



Tak Perlu Berlebihan Menyikapi Mural

Belasan mural terpampang di dinding pagar pembatas antara TBRS dengan eks-Wonderia Semarang. Selain gambar, mural-mural yang berderet dari utara ke selatan itu juga menerakan kalimat ajakan. Sebagian di antaranya ajakan untuk menyukseskan kontestasi politik lima tahunan.

Mural di TBRS itu awalnya dibuat oleh para peserta lomba yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, menjelang Pemilu 2019 silam. Tujuannya untuk sosialisasi sekaligus mengajak masyarakat menyukseskan pemilu dengan memberikan suara di bilik pencoblosan. Saat itu jumlahnya banyak,

tapi sekarang tinggal beberapa yang tersisa. Sebagian telah berganti dengan gambar-gambar bertema lain.

Pemilihan mural sebagai medium sosialisasi pemilu tentu sudah diperhitungkan oleh KPU dengan matang. Perpaduan gambar dengan kalimat persuasif yang dipajang di ruang publik itu akan lebih mudah menarik perhatian.

Ditergok ke belakang, mural memiliki riwayat yang sangat panjang. Menurut dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Nano Warsono, cikal-bakalnya telah ada sejak zaman prasejarah. Salah satu bentuk tertuanya adalah lukisan purba di dinding-dinding gua seperti yang terdapat di Gua Leang-leang,

Maros, Sulawesi Tengah. Dalam perkembangannya mural juga menghiasi dinding gereja di Eropa pada abad pertengahan, hingga akhirnya tumbuh menjadi salah satu bentuk seni rupa pada era modern.

Ya, pada era modern fungsi mural bergeser dari sekadar hiasan menjadi medium untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran. Lebih ekstrem lagi, ia digunakan sebagai alat propaganda atau penyeranta aspirasi di ruang publik.

Mural sebagai medium penyampai gagasan dan

propaganda terlihat dari karya-karya Banksy. Seniman anonim asal Inggris itu kerap menampilkan karya-karyanya yang sarat dengan muatan kritik sosial di dinding-dinding yang tersebar di penjuru kota. Di Indonesia, lanjut Nano, gaya mural serupa tampak dari karya eksponen Apotik Komik dan Taring Padi yang muncul pada awal tahun 2000-an.

Kini, seni mural telah berkembang di banyak kota di Indonesia. Kreator gambar-gambar di dinding yang menyiratkan pesan itu tumbuh bak cendawan di musim penghujan. Satu hal yang menarik, kata Nano Warsono, mural tetap eksis di ten-

gah kemerebakan medium baru berbasis internet. Mengapa demikian?

"Karena mural berada di ruang publik, jadi lebih mudah dilihat dan gampang ditemui tanpa harus membuka internet. Orang-orang bisa melihatnya saat melintas di jalanan kota."

Mural Politis

Belakangan ini, seni mural tengah menjadi perbincangan publik. Garaganya adalah kemunculan gambar-gambar dinding bermuatan politis yang sengaja dibuat untuk mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19. Selain mural bergambar wajah yang diduga Presiden Jokowi dengan imbuhan kalimat "404 Not Found", juga mural bertuliskan "Dipaksa sehat di negara yang sakit".

Menurut pengurus Dewan Kesenian Semarang (Dekase) Daniel Hakiki, kemunculan mural-mural itu memang tidak bisa dilepaskan dari konteks politik Indonesia saat ini. Pembuat mural tengah menyampaikan pesan tertentu kepada pihak yang dituju, khususnya pemerintah. Media mural digunakan karena sang pembuat merasa tidak menemukan saluran formal untuk menyampaikan pesan tersebut.

Semestinya, kata Daniel, kemunculan mural-mural politis itu tidak perlu disikapi secara berlebihan. Apa lagi sampai dihapus dan memburu kreatornya. Meski demikian, lanjut Daniel, pembuat mural perlu memerhatikan etika dalam menyampaikan kritik atau pesannya. Sebab, mural itu dibuat di ruang publik yang secara kasat mata bisa dilihat oleh banyak orang. "Ketika orang mau mengungkapkan sesuatu itu macam-macam caranya. Apakah mengungkapkannya melawan hukum atau prosedural. Jika prosedural ya perlu izin."

Senada dengan Daniel, Nano Warsono juga menyalurkan reaksi aparat yang dianggapnya berlebihan. Penghapusan mural-mural politis itu dan sanksi hukum yang dikenakan kepada sang pembuatnya bukan tindakan yang tepat. Aparatur pemerintah semestinya perlu lebih cermat dalam melihat agar bisa membedakan apakah mural itu merupakan kritik sosial, ujaran kebencian, penghinaan, perusakan fasilitas publik atau bagian dari politik praktis.

"Kasus ini menjadi viral, salah

satunya justru karena mural itu dihapus. Dalam dunia street art penghapusan semacam itu sebenarnya sering terjadi. Tapi dalam kasus ini konteksnya berbeda karena ada muatan politik di dalamnya," kata Nano yang juga seorang seniman mural.

Sementara kepada seniman mural, Nano menekankan perlunya kiat atau strategi untuk menghindari jerat hukum. Kritik dalam mural, kata dia, bisa disampaikan melalui bahasa rupa yang elegan.

Sementara itu dosen Ilmu Komunikasi Undip, Triyono Lukmantoro, melihat persoalan mural politis dalam perspektif lebih luas. Menurutnya, penyampaian pesan semacam itu, apapun bentuknya, umumnya dimulai dari keresahan atas kondisi lingkungan sekitar. Selain kemungkinan kondisi politik yang dianggap kurang memuaskan, bisa jadi karena adanya kesenjangan yang dirasakan dalam berbagai bidang.

Era sekarang dalam istilah dosen lulusan Undip dan UGM ini sedang tren adanya multimedialitas. Dimana semua media, baik media arus utama (*mainstream*), media sosial, dan media jalanan seperti mural menjadi saling terkait. Rupa-rupa media yang terkait ini justru semakin efektif untuk menyampaikan pesan, bahkan mempengaruhi dan akhirnya menciptakan sebuah gerakan besar. (Slamet Daryono, Dananjoyo Kusumo, Hari Santoso-09)

Wingsih (27)

Kurang kerjaan banget menghapus karya orang, semakin dihapus, pasti semakin muncul lebih banyak mural".

(26) Susilo

Seniman, kan, juga rakyat dan rakyat, berhak bersuara. Apa salahnya rakyat bersuara

Solihin (45)

Bisa jadi karena mural dinilai provokatif maka dihapus petugas. Mungkin bikin mural yang menyemangati rakyat saja di saat sekarang ini

(25) Novi

Jembatan Kewek itu kan fasilitas umum. Jadi mungkin enggak boleh (digambari mural), kecuali di dinding milik pribadi dan tidak bikin resah masyarakat, mungkin ya boleh-boleh saja

(Dananjoyo K 21)



SM Oseanika Kusuma
Tulisan bermata protes
di sekitar Jembatan Kewek
di Yogyakarta, Rabu (25/8).



SM Oseanika Kusuma
DIHAPUS: Mural telah dihapus petugas
dengan mengecat ulang dinding tempat
mural itu digambar, Minggu (22/8) siang.



SM Oseanika Kusuma
Pengendara melewati tulisan bermata
protes di Jembatan Layang Lempuyangan
di Yogyakarta, Rabu (25/8).

ADA banyak medium yang bisa digunakan
untuk mengungkapkan aspirasi dan pemikiran.
Salah satunya melalui mural.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005